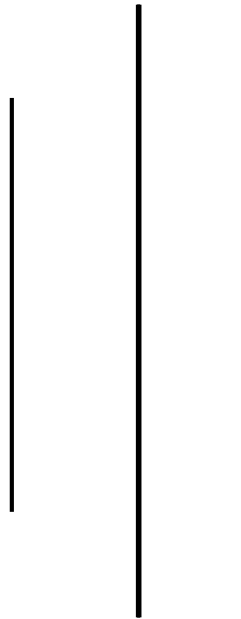




RENCANA KERJA (RENJA)  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI  
TAHUN 2026



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI  
JL. D.I.PANJAITAN NOMOR 14 RENON DENPASAR

## KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan sesanti angayu bagia kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya maka kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 ini masih jauh dari sempurna untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2026 ini dibuat, semoga dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan dalam pencapaian kinerja pada tahun mendatang.

Bali, 15 Agustus 2025  
Inspektur,



**I Wayan Sugiada, S.H.,M.H.**  
NIP. 19651231 198603 1 175

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>6</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Perangkat Daerah....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	7
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	8
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>11</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	11
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Bali .....	14
3.3 Program dan Kegiatan .....	15
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>50</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka paradigma dalam sistem Pemerintahan di Indonesia yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik semakin ditegaskan. Pemerintahan semacam ini disamping merupakan peluang juga sekaligus sebagai tantangan bagi Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan issue paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.

Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah semestinya mendapat respon dari pemerintah dengan melakukan perubahan – perubahan yang terarah untuk mewujudkan good governance.

UNDP memberikan pengertian bahwa governance mempunyai 3 pilar yaitu ekonomi, politik dan administrasi. Oleh karena itu Institusi dari governance meliputi 3 domain yaitu State (Negara atau Pemerintahan) private sector (sektor swasta dan dunia usaha) dan society (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok- kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktifitas ekonomi, sosial dan politik. Jadi good governance dapat diartikan sebagai penyelenggara pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif dengan menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif diantara domain state, private sector dan society.

Jika dilihat dari ketiga domain dalam good governance tersebut tampaknya saat ini domain state menjadi domain yang memegang peranan penting dalam perwujudan good governance, karena pada domain ini mempunyai fungsi pengaturan yang memfasilitasi domain private sector dan society, serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan. Peran pemerintah melalui kebijakannya sangat penting dalam memfasilitasi mekanisme private sector dan society.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai salah satu dari sub sistem didalam domain state mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan clear government (pemerintahan yang bersih) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Inspektorat Daerah Provinsi Bali merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan Pemerintahan tidak lepas dari prinsip-prinsip manajemen modern, dimana fungsi-fungsi manajemen senantiasa berjalan secara simultan dan dinamis sehingga Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 disusun secara komprehensif dan terkoordinasi dengan instansi terkait mencakup seluruh program dan kegiatan baik yang fokusnya di Pemerintah Provinsi Bali maupun yang di Kabupaten/Kota se Bali.

## **1.2 Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
  - h. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
  - i. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
  - j. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);

- k. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 35).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Disusunnya Rancangan Kerja (Renja) tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menjabarkan secara lebih rinci dari kebijakan dan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam upaya pembinaan dan pengawasan ke dalam suatu program dan kegiatan lebih detail sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta jumlah anggaran yang dialokasikan pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

#### **1.3.2. Tujuan**

- a. Sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Bali.
- b. Sebagai pedoman dalam mengevaluasi hasil-hasil kegiatan dan dampaknya terhadap pelaksanaan program untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan.
- c. Sebagai gambaran kegiatan dan strategi pelaksanaan serta jadwal kegiatan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Sebagai gambaran alokasi anggaran.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah
- 2.3 Isu - Isu penting penyelenggaraan tugas dalam fungsi perangkat daerah

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan & Sasaran renja perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

## BAB II

### EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Berdasarkan DPA Tahun 2024 maka evaluasi capaian tahun 2024 dengan 3 (tiga) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan terdiri dari 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan, dengan dukungan dana sebesar Rp. 37.022.649.590,-, realisasi keuangan mencapai Rp. 34.080.531.555,- (92,05%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Pada tahun 2025 Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya didukung 3 (tiga) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan terdiri dari 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah Rp. 38.664.248.243,- dengan sumber dana dari APBD Provinsi Bali.

Adapun rincian capaian fisik dan keuangan program tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan jumlah anggaran Rp. 28.858.814.550,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.484.653.584,- atau sebesar 91,77% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan jumlah anggaran Rp. 4.331.259.160,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.179.365.082,- atau sebesar 96,49% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan jumlah anggaran Rp. 3.832.575.880,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.416.512.889 atau sebesar 89,14% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun demikian ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk bahan evaluasi tahun 2025, yaitu:

- a. Belum adanya sanksi tegas yang dapat diberikan kepada OPD yang menjadi obyek pemeriksaan apabila dalam hasil pemeriksaan yang akan datang masih ditemukan jenis temuan yang sama atau berulang setiap tahun atas hasil pemeriksaan sebelumnya, sebagai efek jera dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Adanya kendala dari tim monitoring tindak lanjut untuk segera menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan BPK RI karena sampai dengan saat ini masih dengan status dalam proses penyelesaian tindak lanjut. Hal ini disebabkan

karena belum optimalnya OPD dalam penyelesaian tindak lanjut, akibat kurangnya pemahaman OPD atas pentingnya menyelesaikan tindak lanjut.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Inspektorat Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5) merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi Bali; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Agar tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik sudah ditetapkan struktur organisasi termasuk pula penetapan uraian tugasnya.

Kebijakan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 yang terdiri dari Pemeriksaan Reguler, Khusus dan Kasus dengan obyek pemeriksaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Bali. Dari PKPT Tahun 2025 rencana akan dilakukan pemeriksaan pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Disamping melakukan pemeriksaan, Inspektorat juga melakukan Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Revidu Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah, Evaluasi dan review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota se-Bali. Diharapkan dengan memberikan asistensi lebih awal mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali yaitu melakukan pengawasan dalam hal ini pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Demikian juga dalam melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional lainnya, yaitu BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis Lainnya.

Berdasarkan kajian Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 maka prioritas program Inspektorat Daerah Provinsi Bali tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat, dapat dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari isu-isu strategis tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis yaitu:

1. Metode interaksi antara faktor Strengths dengan faktor opportunities dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Metode interaksi antara faktor Strengths dengan Threats dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman
3. Metode interaksi antara faktor Weakness dengan faktor Opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan
4. Metode interaksi antara faktor Weakness dengan faktor Threats dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Melalui metode diatas Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan isu strategis:

- a. Tuntutan memperoleh Opini BPK (WTP) yang lebih berkualitas dan dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. Tuntutan penerapan SPIP/MRI di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang lebih efektif;
- c. Tuntutan penguatan APIP yang lebih optimal;
- d. Tuntutan memberikan pelayanan publik yang prima;
- e. Tuntutan optimalisasi pencegahan korupsi melalui Monitoring, Center for Prevention (MCP), Stranas PK dan Survey Penilaian Integritas (SPI).

Diharapkan melalui isu-isu strategi tersebut diatas Inspektorat Daerah Provinsi Bali dapat menjawab dan mewujudkannya serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan selama periode 5 tahun kedepan.

Faktor penentu keberhasilan (Critical Success Factor) ini merupakan faktor-faktor yang sangat penting dari unsur-unsur pemerintah dan masyarakat untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam mewujudkan Visi dan Misi-nya. Faktor-faktor keberhasilan ini berfungsi untuk memfokuskan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam rangka pencapaian Visi dan Misi secara ekonomis, efektif dan efisien.

Berdasarkan analisis faktor lingkungan internal dan eksternal, berikut ini dirumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai berikut:

1. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan hasil pengawasan sebagai alat kontrol penyelenggara pemerintahan. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang, dimana hasil pengawasan merupakan masukan penting dalam penyusunan rencana. Demikian juga masyarakat membutuhkan hasil pengawasan dari aparat pengawasan sebagai bahan pengawasan (pengawasan masyarakat) karena penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Adanya komitmen pimpinan dalam kebijakan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pengawasan dimulai dari penyusunan perencanaan, saat pelaksanaan kegiatan dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
3. Memiliki program pemeriksaan, pendidikan dan pengembangan metode kerja. Guna menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan telah disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk mensinkronkan

pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Disamping itu pula, perlu dilakukan peningkatan kemampuan aparat pengawas dan pengembangan metode kerja.

4. Tersedianya aparat pengawas yang memadai dan memiliki wawasan yang luas serta profesional. Inspektorat Daerah Provinsi Bali belum memiliki aparat pengawas yang memadai baik Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah .
5. Dukungan anggaran Operasional Pengawasan dan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali yang relatif cukup memadai.
6. Sarana dan prasarana pengawasan yang cukup memadai, walaupun hasil perlu ditingkatkan terutama alat bantu pengawasan.
7. Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku *stakeholder*.
8. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan paragraf penjas dalam opini laporan keuangan BPK RI.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Visi Misi Presiden tertuang dalam RPJPN 2025-2045 yaitu : “Terwujudnya Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan merupakan cita-cita yang menggema di pikiran dan relung hati seluruh bangsa”. Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran yang terdiri dari:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat;
5. Intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.

Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (Delapan) Misi atau agenda pembangunan 2045 dengan penjelasan sebagai berikut yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan

karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;

6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi;
8. Kestinambungan pembangun untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

Delapan agenda (Asta Cita) yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam visi misi Presiden/Wakil dijabarkan dalam strategi pembangunan jangka menengah yang digariskan dalam RPJMN 2025-2029 yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 melalui 8 (delapan) misi RPJMN 2025-2029 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yaitu terdiri dari:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Inspektorat Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5) merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaana administrasi Inspektorat Daerah Provinsi Bali; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Bali**

### **3.2.1. Tujuan**

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara ekonomis, efektif dan efisien.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali, maka tujuan yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Bali adalah “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Prestasi kerja merupakan indikator kinerja pelaksanaan program/kegiatan pemerintah sekaligus sebagai fokus utama pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

### **3.2.2. Sasaran**

Untuk menjabarkan berbagai hal yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran prioritas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan;
- b. Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali;
- c. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP;
- d. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal;
- e. Meningkatnya upaya pencegahan korupsi terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali;
- f. Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program/kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 telah dilakukan Pemetaan/Mapping terhadap kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana tabel dibawah ini:

Sesuai Permendagri 13/2006			Nama Kegiatan pada RKPD 2021	Sesuai Permendagri 90/2019				Indikator Kinerja Program (outcome)	KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019		SUB KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019			Target Kinerja Sub Kegiatan		
KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	HASIL (OUTCOME)			
(1)	(2)		(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
4	06		Inspektorat													
4	06	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	X	X	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				85	90	
			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X	X	01	1,01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat daerah yang disusun	Dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	100%
												Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan program dan kegiatan perangkat Daerah yang disusun	Dokumen perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang sesuai ketentuan	100%	
												Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan yang disusun	Dokumen evaluasi perencanaan yang sesuai ketentuan	100%	

Sesuai Permendagri 13/2006			Sesuai Permendagri 90/2019					KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019		SUB KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019			Target Kinerja Sub Kegiatan	
KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Nama Kegiatan pada RKPD 2021	KODE					Indikator Kinerja Program (outcome)	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR		HASIL (OUTCOME)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						(6)	
			X	X	0	1,0			Administrasi Keuangan	Persentase pelayanan administrasi keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	Laporan Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan ASN sesuai ketentuan	100%
											Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sesuai ketentuan	100%
											Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah Bahan Pelaksanaan verifikasi yang dipersiapkan	Dokumen bahan pelaksanaan verifikasi yang sesuai ketentuan	100%
											Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang sesuai ketentuan	100%
											Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan dipersiapkan	dokumen bahan tanggapan pemeriksaan yang sesuai ketentuan	100%

Sesuai Permendagri 13/2006			Nama Kegiatan pada RKPD 2021	Sesuai Permendagri 90/2019				Indikator Kinerja Program (outcome)	KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019		SUB KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019			Target Kinerja Sub Kegiatan	
KODE		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		KODE		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	HASIL (OUTCOME)		
(1)	(2)		(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai ketentuan	100%		
										Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	dokumen keuangan bulanan/semesteran yang sesuai ketentuan	100%		
										Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	dokumen prognosis realisasi anggaran yang sesuai ketentuan	100%		
										Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	laporan keuangan akhir tahun yang sesuai ketentuan	100%		
			Administrasi Umum	X	X	0	1,0			Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran yang	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (01.02.03.01)	jumlah surat-surat kedinasan yang dikirimkan jumlah materai/perangko yang disediakan	Terinformasinya surat-surat kedinasan dengan baik	12 bulan

Sesuai Permendagri 13/2006			Nama Kegiatan pada RKPD 2021	Sesuai Permendagri 90/2019				Indikator Kinerja Program (outcome)	KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019		SUB KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019			Target Kinerja Sub Kegiatan
KODE		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		KODE		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	HASIL (OUTCOME)	
(1)		(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
									sesuai standar dan prosedur	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (01.02.03.02)	jumlah tagihan/pembayaran telepon, listrik dan air sesuai pemakaian	Tersedianya layanan telepon, air dan listrik tersedia secara memadai	12 bulan	
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (01.02.03.08)	jumlah alat kebersihan yang disediakan	Terpeliharanya gedung dan halaman kantor dengan baik	12 bulan	
										Penyediaan Alat Tulis kantor (ATK) (01.02.03.10)	jumlah ATK yang disediakan	Terselenggaranya administrasi perkantoran secara memadai	12 bulan	
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (01.02.03.11)	Jumlah surat/dokumen yang disediakan	Terselenggaranya administrasi perkantoran secara memadai	12 bulan	
											Jumlah surat/dokumen yang digandakan/difotocopy			
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (01.02.03.12)	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	Terpeliharanya instalasi listrik dengan baik	12 bulan	

Sesuai Permendagri 13/2006				Nama Kegiatan pada RKPD 2021	Sesuai Permendagri 90/2019				Indikator Kinerja Program (outcome)	KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019		SUB KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019			Target Kinerja Sub Kegiatan
KODE		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			KODE		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	HASIL (OUTCOME)	
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
											Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan (01.02.03.15)	jumlah surat kabar harian lokal/nasional yang disediakan	Tersedianya informasi secara lengkap dan aktual	12 bulan	
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor (01.02.03.16)	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Tersedianya logistik kantor yang cukup dan memadai	12 bulan	
											Penyediaan makanan dan minuman rapat (01.02.03.17)	Jumlah hidangan (makanan dan minuman) rapat yang disediakan	Terpenuhinya jamuan dalam pelaksanaan tugas rapat/koordinasi secara memadai	12 bulan	
											Rapat rapat koordinasi ke luar daerah (01.02.03.18)	Jumlah pelaksanaan rapat - rapat koordinasi ke luar daerah	Terkoordinasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dengan baik	12 bulan	
											Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (01.02.03.22)	Jumlah paket pengadaan barang/jasa perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang baik dan representatif	12 bulan	

Sesuai Permendagri 13/2006			Nama Kegiatan pada RKPD 2021	Sesuai Permendagri 90/2019				Indikator Kinerja Program (outcome)	KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019		SUB KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019			Target Kinerja Sub Kegiatan
KODE		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		KODE		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	NAMA KEGIATAN		INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	HASIL (OUTCOME)		
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (01.02.03.28)	jumlah paket pemeliharaan bangunan gedung/instalasi kantor	Terpeliharanya bangunan/ instalasi kantor dengan baik sesuai masa manfaat	12 bulan		
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (01.02.03.29)	Jumlah unit mobil jabatan yang dipelihara yang dipelihara secara rutin/berkala	Terpeliharanya mobil dinas jabatan dengan baik sesuai masa manfaat	12 bulan		
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional (01.02.03.30)	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dengan baik sesuai masa manfaat	12 bulan		
									Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor (01.02.03.34)	Jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Terpeliharanya peralatan kantor dengan baik sesuai masa manfaat	12 bulan		

Sesuai Permendagri 13/2006				Nama Kegiatan pada RKPD 2021	Sesuai Permendagri 90/2019					Indikator Kinerja Program (outcome)	KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019		SUB KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019			Target Kinerja Sub Kegiatan
KODE		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	HASIL (OUTCOME)	
(1)		(2)		(3)			(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
4	06	03*	Peningkatan Kapabilitas APiP		6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota						
4	06	04*	Peningkatan Maturitas SPIP *ada pada RPJMD SB namun tidak tercantum dalam RKPD	Peningkatan Kapasitas Aparat Pegawai Intern Pemerintah	6	01	02	1,01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal				
				Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	6	01	02	1,01	01			Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan	Tertibnya administrasi dan tata kelola pemerintahan	- 55 laporan reguler - 3 LHP urusan kab/kota	

Sesuai Permendagri 13/2006			Nama Kegiatan pada RKPD 2021	Sesuai Permendagri 90/2019				Indikator Kinerja Program (outcome)	KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019		SUB KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019			Target Kinerja Sub Kegiatan
KODE		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		KODE		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	NAMA KEGIATAN		INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	HASIL (OUTCOME)		
(1)	(2)		(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah *tidak ada pada RPJMD SB	6	01	02	1,01	02			Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan review kinerja dan keuangan	Terwujudnya keselarasan dokumen kinerja, perencanaan, dan keuangan	- 2 LHR LK - 4 LHR DAK - 7 LHR Perencanaan	
		Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan	6	01	02	1,01	03			Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan pelaksanaan WBS yang ditindaklanjuti	Presentase penyelesaian pengaduan yang ditindaklanjuti	1 laporan	
		Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan Daerah	6	01	02	1,01	04			Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan evaluasi kinerja dan keuangan	Jumlah laporan evaluasi kinerja dan keuangan	- 9 Lap. EKPPD - 45 LKjIP - 1 Lap. SPIP	
		Pemeriksaan Reguler												
		Review Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah												

Sesuai Permendagri 13/2006			Sesuai Permendagri 90/2019				KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019		SUB KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019			Target Kinerja Sub Kegiatan		
KODE	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Nama Kegiatan pada RKPD 2021	KODE				Indikator Kinerja Program (outcome)	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR		HASIL (OUTCOME)	
			(1)	(2)	(3)	(4)						(5)		(6)
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase hasil pemeriksaan terhadap permasalahan - permasalahan yang bersifat khusus/kasus.					
		Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	6	01	0 2	1,0 2	01				Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan audit khusus, kasus, tujuan tertentu dan Dana BOS	Terlaksananya audit khusus, kasus, tujuan tertentu dan Dana BOS	16 laporan
		Pengawasan Dana Desa	6	01	0 2	1,0 2	02				Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan review kinerja dan keuangan	Terwujudnya keselarasan dokumen kinerja dan keuangan	- 4 Lap PA-PBJ
		Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar	6	01	0 2	1,0 2	03				Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan pemantauan Dana Desa dan penanganan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya pemantauan Dana Desa dan penanganan Pengaduan Masyarakat	-2 laporan Dana Desa -12 Laporan Saber Pungli

Sesuai Permendagri 13/2006			Sesuai Permendagri 90/2019					KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019		SUB KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019			Target Kinerja Sub Kegiatan	
KODE	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Nama Kegiatan pada RKPD 2021	KODE					Indikator Kinerja Program (outcome)	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR		HASIL (OUTCOME)
			(1)	(2)	(3)								(4)	
		Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah	6	01	02	1,02	04				Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan evaluasi PPRG	Terwujudnya Kesetaraan Gender di Prov Bali dan Kab/Kota	3 Laporan PPRG
		Pemeriksaan Urusan ke Kabupaten/ Kota												
		Evaluasi PPRG												
		Evaluasi dan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah												
		Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah												
		Pemeriksaan Kasus, Khusus, dan Tujuan Tertentu												
		Pemantauan dan Pemuktahiran Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan												

Sesuai Permendagri 13/2006			Nama Kegiatan pada RKPD 2021	Sesuai Permendagri 90/2019				Indikator Kinerja Program (outcome)	KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019		SUB KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019			Target Kinerja Sub Kegiatan
KODE				KODE					NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	HASIL (OUTCOME)	
(1)			(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Peningkatan Reformasi Birokrasi	Penanganan Benturan Kepentingan dan Whistle Blower System										
				Review Capaian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik										
				Pengawasan Penyelesaian Kerugian Daerah, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah										
4	06	02	Peningkatan Reformasi Birokrasi		6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan				

Sesuai Permendagri 13/2006			Sesuai Permendagri 90/2019					Indikator Kinerja Program (outcome)	KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019		SUB KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019			Target Kinerja Sub Kegiatan	
KODE		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	KODE		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	HASIL (OUTCOME)		
(1)	(2)		(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			6	01	03	1,01			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan					
			6	01	03	1,01	01					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya rumusan kebijakan di bidang pengawasan	Terwujudnya program kerja pengawasan tahunan APIP	100%
			6	01	03	1,01	02					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan/penilaian rumusan kebijakan fasilitasi pengawasan	Terlaksananya pelaporan/penilaian fasilitasi pengawasan	- 1 laporan LHKPN - 1 laporan LHKASN - 2 laporan TLHP - 4 laporan PAK
			6	01	03	1,02					Asistensi dan Pendampingan	Persentase penugasan pada OPD			

Sesuai Permendagri 13/2006			Sesuai Permendagri 90/2019					KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019		SUB KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019			Target Kinerja Sub Kegiatan
KODE		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	KODE			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	HASIL (OUTCOME)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)								
			6	01	03	1,02	02			Asistensi dan Pendampingan	Jumlah laporan Asistensi dan Pendampingan	Terlaksananya asistensi dan pendampingan	12 Bulan

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMN Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan terdiri dari 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah Rp.47.415.366.000,- dengan sumber dana dari APBD Provinsi Bali. Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif dalam tabel berikut ini:

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKA DAERAH (RENJA OPD)  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI  
TAHUN 2026**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional		Daerah	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	17	
						Inspektorat		47.415.366.000,00							
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		47.415.366.000,00							
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH		47.415.366.000,00							
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85,2 Persen	41.834.366.000,00						
	6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	100 Persen	90.506.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		
	6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional		Daerah	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	17	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT	
	6	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	40.506.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT	
	6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen	30.062.700.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional		Daerah	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	17	
	6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	163 Orang/Bulan	30.000.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT		
	6	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	62.700.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional		Daerah	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	17	
	6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen	1.100.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		
	6	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	127 Orang	1.100.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT	
	6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 Persen	1.282.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional		Daerah	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	17	
	6	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT		
	6	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT		
	6	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional		Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	158.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional		Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	17
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	44.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional		Daerah	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	17	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	850.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT	
	6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100 Persen	1.600.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		
	6	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80 Unit	1.600.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional		Daerah	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	17	
	6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi	100 Persen	605.160.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		
	6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.160.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT	
	6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional		Daerah	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	17	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	290.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT	
	6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	310.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT	
	6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen	7.094.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional		Daerah	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	17	
	6	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	1.680.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT		
	6	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5.190.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT		
	6	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional		Daerah	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	17	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	224.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT	
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan	100 Persen	3.571.000.000,00						
	6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal	100 Persen	2.546.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		
	6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional		Daerah	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	17	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 Laporan	205.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT	
	6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10 Laporan	254.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT	
	6	01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional		Daerah	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	17	
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	34 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT	
	6	01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan									
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	252.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT	
	6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional		Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	17
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	58 Laporan	905.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT
	6	01	02	1.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal								
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT
	6	01	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional		Daerah	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	17	
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	55 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT	
	6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu	100 Persen	1.025.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		
	6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah									
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional		Daerah	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	17	
	6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	34 Laporan	910.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT		
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	100 Persen	2.010.000.000,00						
	6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan	100 Persen	965.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		
	6	01	03	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional		Daerah	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	17	
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	395.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT	
	6	01	03	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan									
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	570.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT	
	6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan	100 Persen	1.045.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional		Daerah	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	17	
	6	01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3 Perangkat Daerah	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT		
	6	01	03	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	37 Perangkat Daerah	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT		
	6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									

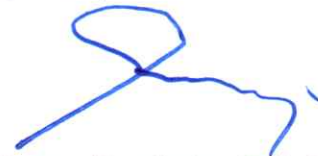
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional		Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	17
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	495.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT
	6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Perangkat Daerah	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT
								<b>J U M L A H</b>	<b>47.415.366.000,00</b>					

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2026, merupakan pokok-pokok dan garis besar program dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2026. Rencana Kerja disusun sebagai acuan/pedoman dalam pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana, sumber dana yang tersedia, serta personil yang terlibat dalam pelaksanaan tugas.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dapat digunakan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban serta rasa tanggung jawab masing-masing dan semoga Tuhan senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan dan kemampuan sehingga tugas- tugas kita dapat diselesaikan dengan baik dan benar.

Bali, 15 Agustus 2025  
Inspektur,



**I Wayan Sugiada, S.H.,M.H.**  
NIP. 19651231 198603 1 175